

**PENGARUH PERAN PERANGKAT DESA, SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi empiris pada Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1



Disusun Oleh:
Vina Andika Krisnawati
16.0102.0109

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2020**

**PENGARUH PERAN PERANGKAT DESA, SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi empiris pada Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:

Vina Andika Krisnawati

NIM. 16.0102.0109

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2020**

SKRIPSI

PENGARUH PERAN PERANGKAT DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi empiris pada Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Vina Andika Krisnawati

NPM 16.0102.0109

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 14 Agustus 2020

Susunan Tim Penguji

Pembimbing


Yulinda Devi Pramita, S.E., M.Sc., Ak.
Pembimbing I

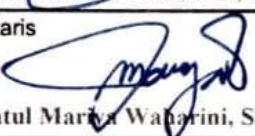
Pembimbing II

Tim Penguji


Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si., Ak.

Ketua


Yulinda Devi Pramita, S.E., M.Sc., Ak.
Sekretaris


Faqiatul Mariza Waharini, S.E., M.Si.
Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal

14 SEP 2020


Dra. Marlina Kurnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vina Andika Krisnawati
NIM : 16.0102.0109
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Progam Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH PERAN PERANGKAT DESA, SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi empiris pada Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, Agustus 2020
Pembuat Pernyataan,



Vina Andika Krisnawati

NIM. 16.0102.0109

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Vina Andika Krisnawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat,Tanggal Lahir : Magelang, 28 November 1995
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Klontong RT 008 RW 003 Jambewangi, Secang,
Kabupaten Magelang
Alamat Email : vinaandika34@gmail.com

Pendidikan Formal

SD (2002-2008) : SD Negeri Kramat 3 Magelang
SMP (2008-2011) : SMP Negeri 5 Magelang
SMA (2011-2014) : SMA Negeri 5 Magelang
PT (2016-2020) : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Pendidikan Non Formal:

-*Basic Learning and Speaking Course* di Universitas Muhammadiyah Magelang
Language Center.
-Pelatihan Dasar Keterampilan Komputer di UPT Pusat Komputer Universitas
Muhammadiyah Magelang.
-TOEFL di Universitas Muhammadiyah Magelang *Language Center*.

Pengalaman Organisasi:

-Komunitas Mahasiswa Entrepreneur (KOMET) Fakultas Ekonomi dan Bisnis
sebagai anggota dan pengurus (2016-2017).

Magelang, Agustus 2020
Pembuat Pernyataan,


Vina Andika Krisnawati
NIM. 16.0102.0109

MOTTO

Sekolahpun keliru bila ia tidak tahu diri bahwa peranannya tidak seperti yang diduga selama ini. Ia bukan penentu gagal tidaknya seorang anak. Ia tak berhak menjadi perumus masa depan.

(Goenawan Mohamad)

The whole purpose of education is to turn mirrors into windows.

(Sydney J. Harris)

The object of education is to prepare the young to educate themselves throughout their lives.

(Robert Maynard Hutchins)

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali mereka mengubah keadaan mereka sendiri.

(QS. Ar Ra'd: 11)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.

(QS. Al Baqarah: 286)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Atas karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Peran Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi empiris pada Kecamatan Secang).**

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Marlina, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Wawan Sadtyo Nugroho, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
3. Ibu Yulinda Devi Pramita, S.E., M. Sc., Ak selaku Dosen Pembimbing satu yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si., Ak dan Ibu Faqiatul Mariya Waharini, S.E., M.Si. selaku dosen penguji yang sudah membantu memberikan saran dan masukan terhadap perbaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
6. Bapak Ngahadi, Ibu Sup, Mbak Ika Krisniawati dan Mas Suparyanto selaku kedua orangtua dan kakak penulis terimakasih atas doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
7. Kaivandra Shuan Abrizam selaku ponakan kecil yang selalu menghibur.
8. Wahid Fahri Ramadhan terimakasih atas doa, semangat, dan perhatiannya.
9. Grup Belajar Lutfiana, Lailatul, Cici, Dea, Maya, Atika dan Carli terimakasih atas semangat motivasi dan bantuannya. Dan semua teman angkatan 16 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu terimakasih sudah menjadi keluarga baru.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis hanya dapat mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Magelang, Agustus 2020
Peneliti



Vina Andika Krisnawati
NPM.16.0102.0109

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	10
A. Landasan Teori	10
1. Teori <i>Stewardship (Stewardship Theory)</i>	10
2. Akuntabilitas.....	11
3. Pemerintah Desa	13
4. Pengelolaan Keuangan Desa.....	13
5. Peran Perangkat Desa	14
6. Sistem Pengendalian Internal.....	16
7. Partisipasi Masyarakat	17
B. Penelitian Sebelumnya	18
C. Perumusan Hipotesis	20
D. Model Penelitian.....	24
BAB III.....	25
A. Populasi dan Sampel.....	25
B. Jenis dan Sumber Data	26
C. Teknik Pengumpulan Data	26
D. Varibel Penelitian dan Pengukuran Variabel	27
E. Metode Analisis Data	28

1.	Statistik Deskriptif	28
2.	Uji Kualitas Data	29
3.	Analisis Regresi Linier Berganda	30
4.	Pengujian Hipotesis	30
BAB IV	34
A.	Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian	34
B.	Statistik Deskriptif Responden	34
C.	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	36
D.	Uji Kualitas Data	38
1.	Uji Validitas	38
2.	Uji Reliabilitas	39
E.	Analisis Regresi Linier Berganda.....	39
F.	Uji Hipotesis	41
1.	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	41
2.	Uji F (<i>Goodness of Fit</i>).....	42
3.	Uji t	43
G.	Pembahasan	45
BAB V	51
A.	Kesimpulan.....	51
B.	Keterbatasan Penelitian	51
C.	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang	3
Tabel 1. 2 Rincian Dana Desa Kecamatan Secang.....	3
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3. 1 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel.....	27
Tabel 4. 1 Sampel Penelitian dan Pengembalian Kuesioner	34
Tabel 4. 2 Profil Responden	35
Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif	36
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas	38
Tabel 4. 5 Cross Loading	38
Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas	39
Tabel 4. 7 Hasil Uji Regresi.....	40
Tabel 4. 8 Koefisien Determinasi	41
Tabel 4. 9 Uji f	42
Tabel 4. 10 Uji t	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Model Penelitian	24
Gambar 3. 1 Penerimaan Uji f	32
Gambar 3. 2 Penerimaan Uji t	33
Gambar 4.1 NilaiKritis Uji f	43
Gambar 4.2 Nilai Kritis Uji t Variabel Peran Perangkat Desa	44
Gambar 4.3 Nilai Kritis Uji t Variabel Sistem Pengendalian Internal	44
Gambar 4.4 Nilai Kritis Uji t Variabel Partisipasi Masyarakat.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	55
Lampiran 2. Penyebaran kuesioner	62
Lampiran 3. Lampiran Surat Keterangan Penelitian	63
Lampiran 4. Tabulasi Data Diolah	68
Lampiran 5. Output SPSS.....	84

ABSTRAK

PENGARUH PERAN PERANGKAT DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi empiris pada Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)

Oleh:

Vina Andika Krisnawati

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Peran Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan sampel kepala desa, sekretaris desa, bendahara, kasi, kaur, dan kepala dusun yang bekerja di kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 228, berdasarkan metode *purposive sampling*. Pemilihan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sedangkan Sistem Pengendalian Internal, Dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kata kunci: peran perangkat desa, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa dana desa masuk dalam salah satu pendapatan desa. Undang-undang desa telah memberi kesempatan bagi pemerintah desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengurus dan mengelola pemerintahan serta sumber daya yang dimiliki. Kebijakan alokasi anggaran yang besar memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan yang seharusnya dilaksanakann secara profesional, efektif,efisien,serta akuntabel. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan semakin meningkat setiap tahunnya.

Situasi penggunaan dana desa rawan terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju. Berkaitan dengan kebijakan dana desa, Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari minimnya pengetahuan perangkat desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan sehingga berpotensi terjadi penyelewengan atau korupsi (Abidin, 2015).

Setiana & Yuliani (2017) menyatakan bahwa temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia (PJI), sebagian korupsi ditingkat desa bukan karena niat kejahatan Kades melainkan karena ketidakpahaman para Kades dalam

mengelola anggaran dan alokasi dana desa. Selain itu juga disebabkan karena minimnya kontrol dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Salah satu aspek yang menjadi permasalahan adalah sumber daya manusia, terdapat potensi persoalan yaitu tenaga pedamping berpotensi melakukan korupsi karena lemahnya memanfaatkan aparat desa (Umaira & Adnan, 2019). Suatu pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh perangkat desa dalam pengelolaan dana desa adalah dengan membuat Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan untuk informasi dalam pengelolaan dana desa ditahun selanjutnya. Dari hasil wawancara dengan perangkat desa bagian dana menyatakan bahwa Kecamatan Secang tidak membuat Laporan Realisasi Anggaran dalam pengelolaan dana desa, perangkat desa hanya menggunakan laporan pagu untuk merealisasikan dana desa.

Akuntabilitas menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan pemerintahan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Sumber daya manusia bisa dilihat dari aparat perangkat desa itu sendiri. Jadi semakin baik peran perangkat desa maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa (Yesinia et al., 2018).

Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah yang mendapatkan anggaran dana desa yang selanjutnya akan diserahkan kepada beberapa kecamatan yang ada dibawahnya. Dana desa yang diperoleh Kabupaten

Magelang meningkat setiap tahunnya. Adapun rincian jumlah anggaran dana desa dapat dilihat pada tabel rincian alokasi dana desa Kabupaten Magelang.

Tabel 1.1. Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Anggaran Dana Desa 2018	Anggaran Dana Desa 2019
1	SALAMAN	17.681.511.000	20.632.388.000
2	BOROBUDUR	16.818.081.000	19.447.049.000
3	NGLUWAR	6.574.540.000	7.756.948.000
4	SALAM	9.904.183.000	11.217.839.000
5	SRUMBUNG	13.768.909.000	16.504.217.000
6	DUKUN	12.508.751.000	14.987.258.000
7	SAWANGAN	13.525.412.000	16.263.917.000
8	MUNTILAN	10.193.906.000	11.976.700.000
9	MUNGKID	11.755.338.000	13.745.453.000
10	MERTOYUDAN	10.446.493.000	12.902.025.000
11	TEMPURAN	13.653.395.000	15.947.053.000
12	KAJORAN	25.138.293.000	29.812.020.000
13	KALIANGKRIK	20.336.583.000	13.077.182.000
14	BANDONGAN	12.515.074.000	15.195.070.000
15	CANDIMULYO	16.283.778.000	19.750.631.000
16	PAKIS	18.851.141.000	21.895.171.000
17	NGABLAK	14.730.459.000	25.044.451.000
18	GRABAG	26.594.007.000	31.313.428.000
19	TEGALREJO	17.695.398.000	20.237.389.000
20	SECANG	15.888.083.000	20.257.888.000
21	WINDUSARI	18.949.088.000	21.332.900.000

Sumber : Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2019

Kecamatan Secang Kabupaten Magelang terdiri dari 19 desa yang memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Adapun rincian jumlah anggaran dana yang diperoleh, dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1. 2 Rincian Dana Desa Kecamatan Secang

No	Desa	Alokasi Per Desa
1	Madusari	1.026.659.000
2	Madyocondro	1.216.934.000
3	Ngabean	948.940.000
4	Krincing	1.029.082.000
5	Donorejo	856.394.000

No	Desa	Alokasi Per Desa
6	Candisari	1.200.435.000
7	Candiretno	1.191.365.000
8	Pancuranmas	916.519.000
9	Jambewangi	949.519.000
10	Payaman	907.826.000
11	Kalijoso	883.673.000
12	Ngadirojo	1.049.152.000
13	Karangkajen	1.136.542.000
14	Sidomulyo	1.365.137.000
15	Pucang	944.526.000
16	Purwosari	1.174.432.000
17	Donomulyo	1.118.920.000
18	Girikulon	1.117.586.000
19	Pirikan	1.224.247.000
	Jumlah	20.257.888.000

Sumber : Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2019

Anggaran desa yang diperoleh dari setiap pemerintah desa yang cukup besar tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi tindak kecurangan atau penyelewengan.

Keberhasilan terhadap pengelolaan dana desa tidak dapat dilepaskan dari segi pengawasan baik oleh pemerintah, lembaga yang terkait ataupun oleh masyarakat. Menurut Widyatama *et al.*, (2017) tentang pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintahan desa dalam mengelola alokasi dana desa menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengendalian internal diharapkan mampu memperbaiki kualitas penyusunan administrasi pengelolaan dana desa sehingga dapat menghindari keterlambatan pencairan dana desa periode berikutnya. Pengendalian internal yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Yesinia *et al.*, (2018) tentang Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan semua variabel yang ada serta metode yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah **Pertama** menambahkan variabel partisipasi masyarakat karena selama ini pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat masih dirasa kurang maksimal. Sewajarnya musrenbang dilakukan tiga sampai empat kali dalam satu tahun. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan musrenbang merupakan program yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Konsep musyawarah menunjukkan bahwa forum musrenbang bersifat partisipatif. Oleh karena itu adanya pertemuan rutin sangat penting guna membangun kepentingan dan kemajuan desa. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu dari tiga komponen seperti pemerintah, masyarakat, swasta tidak berperan atau berfungsi.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan mengingat sensitivitas pengelolaan dana desa yang rentan penyelewengan. Keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari partisipasi masyarakat desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan (Dewi & Gayatri, 2019). Pentingnya pengawasan dalam menunjang keberhasilan suatu program

pembangunan sangat dipengaruhi oleh partisipasi dari masyarakat. Peran serta masyarakat terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa (Herli & Hafidhah, 2017).

Kedua objek penelitian dilakukan di Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Dalam pembuatan laporan keuangan yang akuntabel oleh pemerintah harus mempunyai ketentuan yang jelas. Pemerintah daerah wajib mempublikasikan informasi terkait rencana anggaran kepada masyarakat, memiliki pendekatan proaktif kepada masyarakat dengan melakukan transparansi melalui media informasi berupa website (Katarina, 2006). Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan perangkat desa bagian dana desa menyatakan bahwa Kecamatan Secang belum membuat laporan realisasi anggaran dalam merealisasikan dana desa, hanya saja mereka menggunakan laporan pagu untuk merealisasikan dana desa tersebut. Selain itu sebagai bentuk transparansi melalui media informasi seperti website juga tidak ada untuk mempublikasikan hasil laporan keuangan. Dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah mengembangkan Sistem Manajemen Daerah (SIMDA). Dimana aplikasi ini digunakan untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta menghasilkan informasi yang akurat dan tepat.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penelitian mengenai Pengaruh Peran Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang?
2. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang?
3. Apakah terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.
2. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.
3. Menguji secara empiris dan menganalisis partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti atas bukti empiris yang diperoleh dan mengetahui pengaruh peran perangkat desa, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi pemerintah desa di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat serta menjalankan suatu kebijakan.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu membantu pengembangan desa khususnya pengelolaan dana desa di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dalam melaksanakan kegiatan dan kontribusi untuk kemajuan pemerintah dan masyarakat setempat.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini akan menguraikan mengenai teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok – pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, telaah penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan yang menjelaskan seputar deskripsi data, deskripsi responden, deskripsi variabel penelitian, analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi, dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* merupakan teori alternatif yang muncul dari keberadaan teori agensi yang ada lebih dahulu dalam hubungan prinsipal dan agen dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Sifat dasar manusia yang dapat dipercaya menjadi dasar terciptanya teori *stewardship*, dimana diharapkan manajemen yang menjadi pengelola perusahaan dapat mendahulukan kepentingan perusahaan ataupun organisasi dari kepentingan pribadinya (Jefri, 2018). Teori ini sebagai situasi dimana para *steward* (pengelola) tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan *principal* (pemilik). Teori ini mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.

Stewardship tidak menciptakan melalui peraturan formal namun lebih difasilitasi melalui struktur organisasi yang membantu pemimpin untuk menghasilkan kepercayaan interpersonal dan institusional. Strategi organisasi dan motivasi intrinsik pada pengikut yang pada gilirannya mendorong pengikut untuk bertindak dengan keberanian moral dalam pelayanan kepada organisasi. Masalah keseimbangan dalam teori *stewardship* ini adalah bagian penting dari mengambil tanggung jawab pribadi, pelaku organisasi bertujuan untuk menyeimbangkan kewajiban mereka kepada para pemangku kepentingan di dalam dan di luar organisasi

dengan menjunjung tinggi komitmen yang lebih luas terhadap norma moral masyarakat dan universal. Pemimpin mendorong *stewardship* pada pengikut mereka melalui berbagai relasional, motivasi, dan perilaku kepemimpinan yang mendukung secara kontekstual (Hernandez, 2008). *Stewardship* tercipta dari siklus berulang dari keputusan antargenerasi, agar perilaku *stewardship* dilakukan melalui pertukaran sosial antara pemimpin dan pengikut yang berkembang dari generasi ke generasi (Hernandez, 2018).

Teori *stewardship* didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak kerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi. Sehingga meskipun kepentingan antara *steward* dan *principal* tidak sama, *steward* akan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebab *steward* berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang dapat diterima. Sehingga pihak pengelola akan melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengefektifkan pengendalian internal dan menciptakan budaya organisasi yang baik (Jefri, 2018).

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi setiap pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, serta mengungkapkan setiap aktivitas yang dilakukan kepada pemberi amanah

yang berhak dan memiliki kewajiban untuk mendapatkan pertanggungjawaban (Perdana, 2014). Akuntabilitas terdiri dari 3 jenis:

a. Akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan atau penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.

b. Akuntabilitas manfaat

Akuntabilitas manfaat adalah pertanggungjawaban yang terkait dengan hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas.

c. Akuntabilitas prosedural

Akuntabilitas prosedural adalah pertanggungjawaban terkait dengan prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan etika, moralitas serta kepastian hukum.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap pelaksanaan wewenang yang dimilikinya, agar kewenangan tersebut digunakan sesuai dengan kepentingan organisasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi (Andriani & Zulaika, 2019). Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Suatu organisasi juga bisa dikatakan berhasil atau tidak dapat dilihat dari laporannya. Akuntabilitas

sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan atau bahkan kegagalan suatu organisasi dalam melakukan visi dan misi dalam mencapai hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu dengan beberapa perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintah desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian untuk pelaksanaan Pemerintahan Desa akan dilakukan oleh Pemerintah Desa. Kelurahan sebagai wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota dalam wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui camat (Nordian & Hertianti, 2010).

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah melalui Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 memberikan wewenang suatu desa untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri secara baik dan mandiri (Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014) tentang desa. Proses pengelolaan keuangan desa menurut (BPKP RI, 2016) dimulai dari:

- a. Perencanaan (RKPDesa) yaitu keselarasan perencanaan, tingkat partisipasi dan kualitas RKP Desa.
- b. Penganggaran, terdiri dari Unifikasi dan integrasi Anggaran, Harmonisasi Kades dan BPD, evaluasi APB Desa oleh kecamatan.
- c. Pelaksanaan terdiri dari kewajiban perpajakan, kades “*powerfull*”.
- d. Penatausahaan terdiri dari administrasi pembukuan, cara membuat SPJ, mencatat kekayaan desa, konsep “Belanja Modal dan Belanja Barang”.
- e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban terdiri dari jumlah laporan yang harus dibuat dan tata cara pelaporan.
- f. Pengawasan meliputi efektivitas pengawasan dan kesiapan aparat pengawasan.

APBDes merupakan salah satu alat perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri RI Nomor 113, 2014. APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Begitu besar peran yang diterima desa yang tentunya harus disertai tanggung jawab yang besar pula, oleh karena itu pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana setiap kegiatan atau periode akuntansi harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

5. Peran Perangkat Desa

Perangkat desa yaitu aparatur desa dibawah pimpinan kepala desa. Perangkat desa ialah salah satu unsur pemerintah desa. Sebagai salah satu

faktor pelaku desa, perangkat desa mempunyai peran penting tersendiri dalam membuat kemajuan bangsa melalui desa (Indrianasari, 2017). Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa. Peran dari perangkat desa diharapkan bisa mengelola dan mengembangkan masyarakat beserta sumberdaya yang dimiliki secara tepat dan mudah. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, kepala desa membentuk pelaksana teknis pengelola keuangan desa (PTPKD) yang merupakan unsur dari perangkat desa. Sehingga perangkat desa mempunyai peran dalam melaksanakan rancangan keuangan desa sesuai peraturan yang ditetapkan sehingga tercipta akuntabilitas (Yesinia *et al.*, 2018).

Kepala desa sebagai wakil pemerintah di desa yang bersangkutan adalah penguasa tunggal dalam arti:

- a. Memimpin pemerintah desa
- b. Mengkoordinasi pembangunan desa
- c. Membina kehidupan masyarakat disegala bidang

Menurut Widjaja (2002) yang dimaksud dengan perangkat desa adalah:

- a. Unsur staf yaitu unsur pelaksana kesekretariatan (sekretaris desa) bertanggung jawab kepada kepala desa.
- b. Unsur pelaksana teknis yaitu kepala urusan, bertanggung jawab kepada sekretaris desa dalam bidang tugasnya.

- c. Unsur wilayah yaitu kepala dusun yang membantu kepala desa diwilayah bagian desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

6. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah suatu alat pengendalian sistem internal ini dilaksanakan pada semua lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah PP Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Internal sendiri merupakan usaha, perbuatan dan kegiatan yang dijalankan setiap saat oleh pimpinan maupun semua pegawai agar tujuan organisasi bisa tercapai dengan cara kegiatan yang tepat dan mudah, pelaporan keuangan yang baik, keamanan aset negara, dan tertib pada peraturan perundang-undangan. Tujuan sistem pengendalian internal pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang kegiatan efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, penggunaan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan. Adapun unsur pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengawasi, mengarahkan serta mengukur sumber daya suatu lembaga atau organisasi serta memiliki peran yang penting di dalam pencegahan dan pendeteksian adanya tindakan *fraud* atau kecurangan. Dengan adanya sistem pengendalian internal maka proses pengelolaan keuangan desa dapat diarahkan, diawasi dan dapat dideteksi apabila terdapat

penyelewengan sehingga laporan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga sistem pengendalian internal dalam pemerintahan merupakan faktor yang penting karena dengan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas desa tersebut (Widyatama et al., 2017).

7. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merujuk pada “keterlibatan anggota masyarakat dalam pemerintahan dalam berbagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat, dan bentuk-bentuk termasuk aktivitas yang memungkinkan beberapa individu dan kelompok–kelompok yang representatif untuk mempengaruhi keputusan publik yang menggambarkan kepentingan mereka” (Howell, 2015). Kondisi masyarakat yang semakin kritis dalam era reformasi ini sekarang menuntut pemerintah dan organisasi sektor publik lainnya untuk mengelola pelayanan publik secara lebih transparan serta partisipasi agar pelayanan menjadi lebih efektif dan akuntabel. Untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi yang kuat dari masyarakat terhadap pembangunan, masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pada tahap perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan (Bastian, 2010).

Partisipasi masyarakat sebagai proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan

kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Pendapat tersebut menggambarkan bahwa partisipasi dari masyarakat dalam segala aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik itu dalam hal perencanaan, pelaksanaan ataupun dalam hal pemantauan atau pengawasan. Partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Pembangunan akan gagal tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan (Atiningsih, 2019).

B. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	(Widyatama et al., 2017)	Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Sistem pengendalian Internal positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
2.	(Setiana & Yuliani, 2017)	Variabel Independen: Peran Perangkat Desa Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3.	(Luthfi et al., 2017)	Variabel Independen: Partisipasi Masyarakat Variabel Dependen: Pengelolaan Dana Desa	Partisipasi Masyarakat berpengaruh Positif terhadap Pengelolaan Dana Desa
4.	(Indrianasari, 2017)	Variabel Independen: Peran Perangkat Desa Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan	Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa

Lanjutan 2.1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
5.	(Yesinia et al., 2018)	<p>Variabel Independen: Peran Perangkat Desa Sistem Pengendalian Internal</p> <p>Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	Peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
6.	(Umaira & Adnan, 2019)	<p>Variabel Independen: Partisipasi Masyarakat</p> <p>Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	Partisipasi Masyarakat berpegaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
7.	(Laksmi & Sujana, 2019)	<p>Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal</p> <p>Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan Desa</p>	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
8.	(Atiningsih, 2019)	<p>Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal Partisipasi Masyarakat</p> <p>Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
9.	(Andriani & Zulaika, 2019)	<p>Variabel Independen: Peran Perangkat Desa</p> <p>Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

10. (Dewi & Gayatri, 2019)	Variabel Independen: Partisipasi Masyarakat Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
----------------------------	---	--

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2020

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Perangkat desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain kepala desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala Desa. Sesuai rumusan Undang-Undang Desa Pasal 1 Angka 3 kedudukan kepala desa adalah membantu desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Perangkat desa dengan pengetahuan yang memadai akan sangat membantu dan mendukung keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa sebagai *steward* harus mampu patuh terhadap aturan terkait pengelolaan desa, terlebih jumlah dana desa yang setiap tahunnya meningkat.

Perangkat desa merupakan salah satu faktor pelaku desa yang mempunyai peran penting dalam membuat kemajuan suatu bangsa melalui desa (Indrianasari, 2017). Peran dari perangkat desa diharapkan bisa mengelola dana desa dan mengembangkan masyarakat beserta sumber daya yang dimiliki secara tepat. Perangkat desa berjalan dengan baik terhadap akuntabilitas dana desa (Irma, 2019). Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana perangkat desa sebagai *steward* bisa diajak kerjasama

untuk dapat mewujudkan tujuan dari organisasi yang sudah dirancang sebelumnya. Disini peran perangkat desa harus bertindak dengan keberanian moral dalam pelayanan kepada organisasi.

Penelitian Indrianasari (2017), Setiana & Yuliani (2017), menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: Peran Perangkat Desa Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa

Sistem pengendalian internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Pengendalian internal harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas yang bertujuan agar dapat menjamin dan menyediakan laporan informasi keuangan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (Novikasari, 2017).

Salah satu cara untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik, sistem pengendalian internal sangat berperan. Sistem pengendalian internal merupakan proses dimana setiap tindakan atau usaha yang dijalankan setiap saat oleh pimpinan dan seluruh pegawai agar memberikan keyakinan agar tujuan kelompok bisa tercapai dengan tepat

dan mudah, laporan keuangan yang baik, serta ketaatan dengan terhadap Peraturan Perundang-undangan (Yesinia *et al.*, 2018). Sistem pengendalian internal dalam pemerintah desa merupakan faktor yang sangat penting karena akan berpengaruh langsung dalam pengambilan keputusan internal pemerintah desa. Sebab *steward* berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang dapat diterima. Sehingga pihak pengelola akan melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengefektifkan pengendalian internal. Sebagai *steward* pemerintah desa dapat mengarahkan dalam mengelola pengendalian internal agar menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian Yesinia *et al.*, (2018), Widyatama *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Keberhasilan dan terwujudnya pelaksanaan pengelolaan dana desa tidak hanya dipengaruhi oleh pemimpin pemerintah dan para pegawainya saja,

partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting sebagai pendukung kegiatan baik secara fisik maupun non fisik.

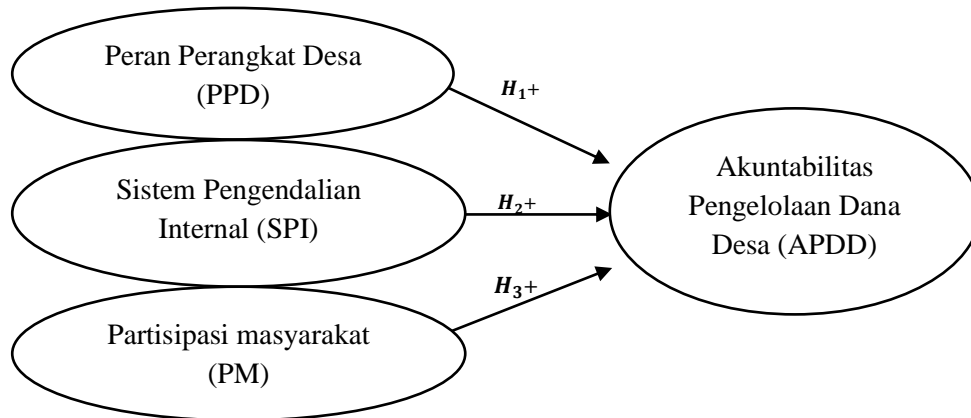
Sejalan dengan teori *stewardship* bentuk akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa dengan memberikan kesejahteraan dan tanggung jawab kepada pihak masyarakat akan menimbulkan respon yang baik kepada masyarakat. Respon yang baik dimaksudkan untuk memperoleh penilaian dari masyarakat dalam kinerja pemerintah dalam hal kesesuaian dan permintaan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam segala proses penetapan kebijakan maupun anggaran pemerintah sebagai wujud pengendalian terhadap pihak manajemen dalam menjalankan organisasi (Dewi & Gayatri, 2019). Partisipasi masyarakat bisa dikatakan bahwa ada keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkatkan pembangunan desa.

Penelitian yang dilakukan Mada *et al.*, (2017), Irma, (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3: Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

D. Model Penelitian

Berdasarkan hubungan variabel diatas, maka gambar kerangka konsep sebagai berikut :



Gambar 2. 1. Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah atau komunitas yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:23). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang bekerja di Kelurahan se Kecamatan Secang Kabupaten Magelang sebanyak 19 Desa yang mendapatkan dana desa. Sampel adalah sebagian dari populasi (Supranto, 2008). Sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu teknik *sampling non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa:
 - a. Kepala desa
 - b. Sekretaris desa
 - c. Kepala urusan keuangan
 - d. Kepala urusan umum
 - e. Kasi pemerintahan
 - f. Kepala dusun
2. Perangkat desa yang bekerja lebih dari satu tahun.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu data primer berupa kuesioner. Dimana data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik survei merupakan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan memberikan kuesioner yang langsung disebar kepada kriteria responden di desa se- Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Variabel-variabel penelitian tersebut diukur dengan menggunakan instrumen kuesioner yang berisi beberapa pernyataan.

Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner ini merupakan replikasi yang diambil dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari masing-masing variabel penelitian, responden diminta untuk memberikan penilaian atau pendapat. Kuesioner yang telah diisi responden diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pada pengisiannya, tidak akan dihitung dalam analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik survey diharapkan langsung lebih efektif dan mengurangi resiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar.

D. Varibel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3. 1 Varibel Penelitian dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Skala Pengukuran
1	Peran Perangkat Desa	Peran perangkat desa yaitu keikutsertaan sekelompok orang yang membimbing Kepala Desa dalam membuat kebijakan dan rancangan yang ada dalam administrasi desa, serta pembantu tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan sebagai pelaksana teknis (Yesinia <i>et al.</i> , 2018)	Skala likert 1-5, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju sampai skala 5 = Sangat Setuju
2.	Sistem pengendalian internal	Sistem Pengendalian Internal yaitu proses dimana setiap tindakan atau usaha yang dijalankan pimpinan dan seluruh pegawai agar memberikan keyakinan agar tercapainya tujuan kelompok melalui kegiatan yang tepat dan mudah, laporan keuangan yang baik, keamanan asset Negara dan ketatan terhadap Peraturan undang-undang (Yesinia <i>et al.</i> , 2018)	Skala likert 1-5, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju sampai skala 5 = Sangat Setuju
3.	Partisipasi masyarakat	Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam segala proses penetapan kebijakan maupun anggaran pemerintah sebagai wujud pengendalian terhadap pihak manajemen dalam menjalankan organisasi (Dewi & Gayatri, 2019)	Skala likert 1-5, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju sampai skala 5 = Sangat Setuju

No	Variabel	Definisi	Skala Pengukuran
4.	Akuntabilitas Dana Desa	Kewajiban yang dimiliki oleh individu yang diamanati mengelola sumber daya dengan cara mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja individu, badan hukum, maupun pemimpin kepada yang memiliki hak untuk menerima pertanggungjawaban dan keterangan (Mada <i>et al.</i> , 2017)	Skala likert 1-5 yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju Sampai skala 5 = Sangat Setuju

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2020

E. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian, seperti jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, tingkat jabatan, dan lama masa kerja. Metode ini digunakan sebagai teknik analisis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran jumlah kuesioner yang kembali dan perbandingan dengan kuesioner yang dikirim dengan menyajikan tabel yang berisi nilai maksimal, minimal, mean, dan standar deviasi yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Ghozali, 2018 : 97). Uji validitas ini digunakan untuk mengukur valid atau sah nya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan yang ada dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan apa yang akan diukur oleh suatu kuesioner tersebut.

Pengujian validitas dilakukan dengan *confirmatory factor analysis* (CFA). CFA digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. Analisis faktor konfirmatori mengelompokkan masing-masing indikator kedalam beberapa faktor apabila yang digunakan indikator konstruk, kemudian dengan melihat dari nilai faktor *loading*-nya. Syarat yang harus dipenuhi pertama, loading factor harus signifikan. Karena loading factor yang signifikan bisa jadi rendah nilainya, maka *standardized loading estimated* harus sama dengan 0.05 atau lebih, dan idealnya 0.07 (Ghozali, 2018: 97). Jadi item pertanyaan yang memiliki loading factor > 0.50 dapat dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas ini digunakan untuk menguji seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menghitung

Cronbach Alpha dari masing masing instrumen dalam suatu variabel. Suatu instrumen dalam suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai koefisien *Cronbach Alpha* (α) lebih besar dari 0,70 atau 70% (Ghozali, 2018: 97).

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda adalah suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dependen dan beberapa variabel independen.

$$APDD = \alpha + \beta_1PPD + \beta_2SPI + \beta_3PM + e$$

Keterangan :

APDD = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

α = Nilai Intersep (Konstan)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

PPD = Peran Perangkat Desa

SPI = Sistem Pengendalian Internal

PM = Pasrtisipasi Masyarakat

e = error

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi (uji R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variabel-variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Nilai koefisien determinasi ini adalah antara nol sampai dengan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil

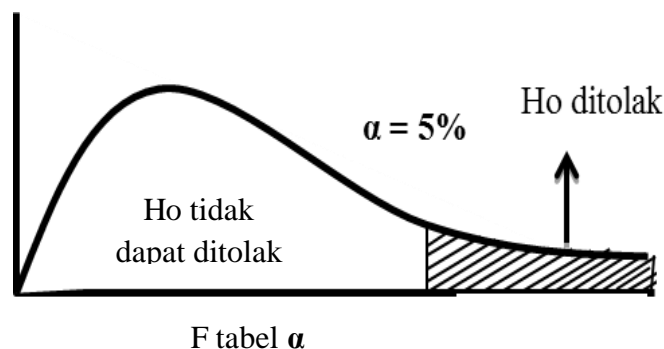
mengandung arti bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas (Ghozali, 2018: 97). Sebaliknya nilai R^2 yang hampir mendekati satu mengandung arti bahwa variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

b. Uji F

Nilai F digunakan untuk menguji ketepatan model. Pengujian ini pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Uji F ini juga menguji apakah variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan sudah tepat atau tidak.

Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikan 5% dengan derajat kebebasan pembilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut ($df = n-k-1$) dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

1. Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0.05$ maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).
2. Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0.05$ maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (*tidak fit*).

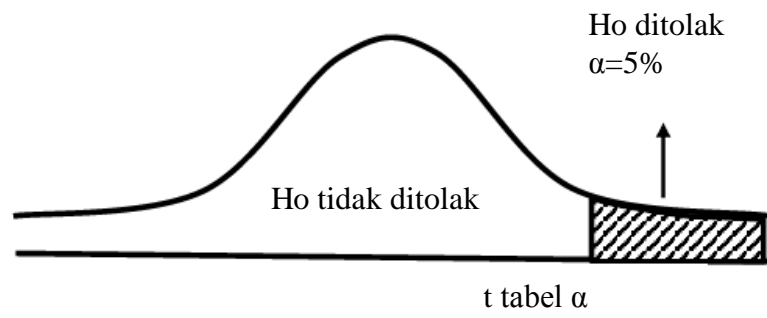


Gambar 3. 1
Penerimaan Uji F

c. Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018: 98). Uji T ini digunakan untuk mengukur signifikan pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} masing-masing koefisiensi regresi dengan t_{tabel} sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Tingkat kepercayaan 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$ yang digunakan dalam proses pengujian ini (Ghozali, 2018: 98).

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $p\ value < \alpha = 0.05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $p\ value > \alpha = 0.05$ maka H_0 diterima atau H_a tidak dapat diterima, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3. 2
Penerimaan Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka variabel peran perangkat desa, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat mempunyai kemampuan dalam menjelaskan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 27,5% sedangkan sisanya 72,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Variabel sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Secang kabupaten Magelang.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Variabel independen peran perangkat desa, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat dalam penelitian ini menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variabel lain yang juga dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Tidak adanya masalah yang signifikan terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.

C. Saran

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya memilih lokasi yang benar-benar ada masalah terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Penelitian selanjutnya dalam membuat kuesioner untuk memperhatikan peraturan-peraturan yang baru agar penelitian yang dilakukan lebih akurat dan valid seperti pada peraturan tentang pengelolaan dana desa (Permendagri Nomor 20, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v6i1.156>
- Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 119–144.
- Atiningsih, S. (2019). PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PENGELOLA DANA DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10, 2015–2019.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (S. Saat (ed.); Ketiga). Penerbit Erlangga.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 1269–1298.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herli, M., & Hafidhah. (2017). *PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DI DESA*. V(1), 43–52.
- Hernandez, M. (2008). Promoting Stewardship Behavior in Organizations: A Leadership Model. *Journal of Business Ethics*, 1(80), 121–128.
- Hernandez, M. (2018). Promoting Stewardship Behavior In Organizations: A Leadership Model. *Journal of Business Ethics*, 80 (1), 121–128.
- Indrianasari, N. T. (2017). PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA KARANGSARI KECAMATAN SUKODONO). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan Dan Pajak*, 1, 29–46.
- Irma, A. (2019). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN DOLO SELATAN KABUPATEN SIGI. *E-Jurnal Katalogis*, 3(33), 121–137.
- Jefri, R. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28.
- Kardiyono, K. (2017). *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*.
- Katarina. (2006). *No Title*.
- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 2155–2182.
- Luthfi, A., Rini, H. S., Gustaman, F. A., Arsal, T., & Rochana, T. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa Di*

- Desa Keji Kabupaten Semarang*. 121–130.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa , Komitmen Organisasi Pemerintah Desa , dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 8, 106–115.
- Nainggolan, F. A. (2018). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017)*.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (L. Alfiah (ed.); Edisi 2). Salemba Empat.
- Novikasari, Y. (2017). PENGARUH MORALITAS INDIVIDU, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, DAN KETAATAN ATURAN AKUNTANSI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Empiris pada SKPD Kab. Kuantan Singingi). *JOM Fekon*, 4(1), 1516–1530.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007.
- Perdana, K. W. (2014). *PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA, KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANTUL*.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014.
- Permendagri Nomor 66 Tahun 2007.
- Permendagri RI Nomor 113, (2014).
- PP Nomor 60 Tahun 2008.
- Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *The 6th University Research Colloquium*, 205–210.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Undang-Undang Desa pasal 1 angka 3.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Widjaja, H. A. . (2002). *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20.
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)*, 10(1), 105–112. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.13112>